



Komunikasi Antar Budaya Petugas Pemasyarakatan Dan Warga Binaan Asing di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura

Tresia Rita Hulir¹, Herry Fernandes Butar Butar²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: tresiaritahulir@gmail.com¹, herryfbutar2@gmail.com²

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 29 Agustus 2025

ABSTRACT

Differences in language, social values, and cultural norms create significant barriers in rehabilitation and reintegration processes. The objective of this study is to analyze the dynamics of intercultural communication, identify the main challenges, and formulate effective strategies to improve interaction quality. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed, utilizing in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The findings indicate that communication barriers significantly affect rehabilitation effectiveness, access to healthcare services, and the protection of inmates' rights. Implementing intercultural communication competence, multilingual guidelines, officer training, and translation technology proved effective in enhancing interaction. The study provides practical implications for strengthening inclusive, harmonious, and equitable correctional policies.

Keywords: *Intercultural Communication, Foreign Inmates, Correctional Institution*

ABSTRAK

Perbedaan bahasa, nilai sosial, dan norma budaya memunculkan hambatan signifikan dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi antarbudaya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi efektif guna meningkatkan kualitas interaksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi berdampak pada efektivitas pembinaan, akses layanan kesehatan, dan perlindungan hak-hak WBA. Implementasi strategi berbasis kompetensi antarbudaya, penyediaan panduan multibahasa, pelatihan petugas, dan pemanfaatan teknologi penerjemahan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Komunikasi Antarbudaya, Warga Binaan Asing, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial yang memungkinkan pertukaran makna, pemahaman, dan hubungan antarindividu. Dalam konteks masyarakat multikultural, komunikasi memegang peran krusial karena melibatkan perbedaan bahasa, budaya, nilai, dan norma sosial yang memengaruhi proses interaksi. Di Indonesia, keberagaman budaya dan bahasa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks pelayanan publik dan lembaga pemasyarakatan. Fenomena komunikasi lintas budaya menjadi semakin kompleks karena tidak hanya terkait dengan pertukaran pesan, tetapi juga menyangkut pemaknaan identitas dan pembentukan relasi sosial di ruang yang heterogen (Watson, 2017).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya dan bahasa tertinggi di dunia. Menurut data UNESCO, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah aktif, menjadikannya negara dengan kompleksitas komunikasi yang unik (UNESCO, 2023). Kondisi ini berimplikasi pada tantangan besar dalam manajemen sosial, termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menampung warga binaan dengan latar belakang etnis, bahasa, dan agama yang beragam. Perbedaan bahasa seringkali memunculkan kesenjangan pemahaman, terutama ketika menyangkut warga binaan asing (WBA) yang kurang memahami bahasa Indonesia. Situasi ini dapat memengaruhi efektivitas proses rehabilitasi dan pembinaan (Croux et al., 2023).

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura, yang menghadapi peningkatan jumlah warga binaan asing, khususnya dari Papua Nugini. Banyak dari mereka tidak fasih berbahasa Indonesia, sementara petugas pemasyarakatan juga tidak menguasai bahasa Tok Pisin atau bahasa daerah lain yang digunakan WBA. Hambatan komunikasi ini berdampak pada efektivitas interaksi sehari-hari, termasuk dalam penyampaian aturan, pemberian layanan kesehatan, dan pelaksanaan program pembinaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan riset internasional bahwa kendala bahasa berkontribusi signifikan terhadap marginalisasi warga binaan asing dan menurunkan kualitas rehabilitasi (Brosens et al., 2023).

Selain perbedaan bahasa, tantangan komunikasi juga dipengaruhi oleh norma sosial, kebiasaan budaya, ekspresi emosional, dan keyakinan agama. Petugas pemasyarakatan dituntut memiliki kompetensi komunikasi antarbudaya untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan mencegah potensi konflik. Studi sebelumnya menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya yang inklusif dapat memperkuat proses adaptasi sosial dan mengurangi risiko isolasi psikologis pada warga binaan asing (Barnett, 2011; Watson, 2017). Tanpa pendekatan komunikasi yang efektif, proses pembinaan tidak hanya terhambat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang berdampak pada keamanan Lapas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan petugas pemasyarakatan dalam komunikasi antarbudaya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas interaksi dan keberhasilan rehabilitasi. Menurut teori *Cultural Convergence* yang dikembangkan oleh Kincaid dan Barnett (1983), pemahaman

lintas budaya dapat dicapai melalui proses interaksi yang berkelanjutan dan terbuka, sehingga memungkinkan terbangunnya kesamaan persepsi, perilaku, dan ekspektasi antara petugas dan warga binaan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik internasional yang menekankan pentingnya program pelatihan komunikasi berbasis empati, penggunaan panduan multibahasa, dan kolaborasi antara petugas dengan penerjemah profesional (Watson, 2017; Croux et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi antarbudaya antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan asing di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan komunikasi yang dihadapi serta merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kualitas interaksi antarbudaya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik komunikasi dalam sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika komunikasi antarbudaya antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan asing (WBA) di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam berdasarkan konteks nyata dan pengalaman subjek penelitian (Yin, 2017). Subjek penelitian terdiri dari petugas pemasyarakatan dan WBA yang dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam interaksi komunikasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memperoleh informasi komprehensif terkait hambatan komunikasi, strategi adaptasi, dan praktik pembinaan. Data dianalisis menggunakan metode reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan melalui proses analisis tematik, dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori Konvergensi Budaya sebagai kerangka konseptual (Croux et al., 2023; Kincaid & Barnett, 1983). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komunikasi Antarbudaya di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura

Proses komunikasi antarbudaya antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan asing (WBA) di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura menunjukkan dinamika yang kompleks karena adanya perbedaan bahasa, budaya, dan nilai sosial. Data lapangan mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi lebih dominan terjadi pada interaksi awal, di mana sebagian besar WBA, khususnya yang berasal dari Papua Nugini, tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penyampaian informasi terkait aturan, tata tertib, dan program rehabilitasi, sejalan dengan temuan Watson (2017) yang menegaskan bahwa kompetensi komunikasi lintas budaya menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi sosial.

Dalam praktiknya, petugas pemasyarakatan sering memanfaatkan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, simbol, dan ilustrasi untuk membantu proses penyampaian pesan. Strategi ini terbukti efektif untuk menjembatani keterbatasan bahasa dan membangun pemahaman awal, terutama pada tahap orientasi WBA. Pendekatan ini konsisten dengan teori *Nonverbal Intercultural Adaptation* yang menyatakan bahwa komunikasi visual memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman lintas budaya ketika keterbatasan linguistik menjadi hambatan (Gudykunst, 2005).

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa interaksi yang dilakukan secara berulang menciptakan proses adaptasi bertahap baik dari pihak petugas maupun WBA. Temuan ini selaras dengan teori *Cultural Convergence* oleh Kincaid & Barnett (1983), yang menegaskan bahwa kontak sosial berkelanjutan dalam sistem tertutup dapat membentuk kesamaan persepsi, perilaku, dan norma antarindividu dari latar belakang budaya berbeda. Hal ini terlihat pada proses adaptasi WBA terhadap sistem pembinaan, meskipun membutuhkan waktu relatif lama.

Selain bahasa, perbedaan norma sosial dan kebiasaan budaya menjadi faktor signifikan yang memengaruhi interaksi. Misalnya, beberapa WBA memandang kontak mata langsung sebagai tindakan kurang sopan, sedangkan dalam budaya petugas Indonesia, kontak mata dianggap sebagai bentuk penghormatan. Ketidaksesuaian interpretasi semacam ini sering menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan emosional. Studi internasional mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa perbedaan persepsi norma sosial merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik komunikasi antarbudaya (Brosens et al., 2023).

WBA juga menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi hukum, layanan medis, dan program pembinaan. Beberapa di antaranya mengalami keterlambatan mendapatkan bantuan hukum karena kurangnya fasilitas penerjemah resmi di Lapas. Kondisi ini sejalan dengan laporan *European Journal of Criminology* (Croux et al., 2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap informasi berbasis bahasa dapat memunculkan ketidaksetaraan hak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil wawancara juga mengungkapkan perbedaan pola adaptasi antarindividu WBA. Beberapa individu, seperti JS dan GK, berhasil menyesuaikan diri melalui interaksi sosial dengan sesama WBA dan bantuan petugas yang sabar dalam memberikan penjelasan, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan karena isolasi psikologis. Hal ini mendukung penelitian Watson (2017) yang menegaskan bahwa keberhasilan integrasi sosial WBA dipengaruhi oleh kombinasi dukungan lingkungan, kapasitas adaptasi personal, dan keterampilan komunikasi antarbudaya petugas.

Petugas pemasyarakatan yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi WBA menunjukkan efektivitas komunikasi yang lebih baik. Mereka mampu menggunakan pendekatan empatik dengan memahami latar belakang budaya WBA sebelum menyampaikan informasi terkait aturan dan kebijakan Lapas. Strategi ini sejalan dengan pendekatan *Intercultural Sensitivity Training* yang

direkomendasikan oleh Deardorff (2019), di mana petugas didorong untuk membangun kesadaran budaya sebelum melakukan interaksi lintas budaya.

Namun, tantangan tetap muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan fasilitas pendukung seperti modul multibahasa. Penelitian global menegaskan bahwa kurangnya dukungan struktural dapat memperburuk eksklusi sosial WBA dan menurunkan kualitas rehabilitasi di dalam Lapas (Hanvey, 2022). Oleh karena itu, integrasi fasilitas bahasa menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antarbudaya.

Proses komunikasi yang berhasil tidak hanya mengurangi kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal antara petugas dan WBA. Relasi yang harmonis terbukti menciptakan rasa aman dan meningkatkan partisipasi WBA dalam program pembinaan. Hal ini konsisten dengan hasil riset Barnett (2011), yang menemukan bahwa keterbukaan komunikasi antarbudaya dapat membangun kepercayaan, menciptakan keterlibatan sosial, dan mendukung keberhasilan rehabilitasi.

Secara keseluruhan, temuan pada subjudul ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi antarbudaya di Lapas Narkotika Jayapura sangat dipengaruhi oleh faktor linguistik, sosial, psikologis, dan struktural. Keberhasilan proses pembinaan bergantung pada kesediaan petugas dan WBA untuk membangun kesadaran budaya bersama serta dukungan institusional yang memadai. Strategi pelatihan petugas berbasis kompetensi antarbudaya dan penyediaan panduan multibahasa direkomendasikan sebagai solusi untuk meminimalisasi hambatan komunikasi.

Strategi Peningkatan Efektivitas Komunikasi Antarbudaya

Hasil penelitian menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih adaptif untuk mengatasi hambatan interaksi antara petugas pemasyarakatan dan WBA. Salah satu pendekatan efektif adalah penerapan *Intercultural Communication Competence* (ICC), yang menekankan pentingnya pemahaman, empati, dan keterampilan adaptasi dalam proses pertukaran pesan (Deardorff, 2019). Dengan pelatihan berbasis ICC, petugas dapat meningkatkan sensitivitas budaya dan meminimalkan kesalahpahaman.

Penyediaan panduan multibahasa menjadi strategi utama untuk membantu WBA memahami aturan dan prosedur Lapas. Implementasi panduan ini sejalan dengan praktik internasional di lembaga pemasyarakatan Eropa, di mana keberadaan materi berbahasa asli WBA terbukti meningkatkan partisipasi mereka dalam program rehabilitasi (Croux et al., 2023). Panduan visual berbasis ilustrasi juga direkomendasikan untuk memperkuat pemahaman informasi bagi WBA dengan tingkat literasi rendah.

Penerapan teknologi berbasis digital, seperti aplikasi penerjemah otomatis dan modul pembelajaran berbasis video, dapat memperkuat efektivitas komunikasi antarbudaya di lingkungan Lapas. Penelitian terbaru oleh Brosens et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam interaksi lintas

budaya mampu mempercepat proses adaptasi WBA dan mengurangi beban petugas.

Selain itu, integrasi pendekatan interdisipliner juga diperlukan dengan melibatkan ahli bahasa, psikolog, dan konselor budaya dalam mendukung proses pembinaan. Kolaborasi lintas bidang dapat menciptakan sistem komunikasi yang lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan WBA secara lebih optimal (Watson, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan *European Prison Rules* yang menekankan perlunya layanan pendukung berbasis multidisiplin untuk narapidana asing.

Peningkatan kualitas komunikasi juga memerlukan peningkatan kapasitas petugas melalui program pelatihan formal dan praktik berbasis simulasi. Pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman petugas terhadap perilaku, kebiasaan, dan persepsi budaya WBA, sehingga mengurangi risiko konflik interpersonal. Menurut Deardorff (2019), pelatihan berbasis simulasi terbukti meningkatkan keterampilan adaptasi komunikasi secara signifikan dalam konteks multikultural.

Dukungan kebijakan institusional memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan strategi komunikasi antarbudaya. Regulasi internal Lapas perlu memfasilitasi penyediaan fasilitas penerjemah, panduan informasi, dan pelatihan petugas secara berkelanjutan. Penelitian internasional menggarisbawahi bahwa kebijakan berbasis inklusi meningkatkan kualitas rehabilitasi WBA sekaligus memperkuat keamanan lembaga pemasyarakatan (Hanvey, 2022).

Hasil observasi juga menegaskan bahwa keterlibatan sesama WBA dalam memberikan bimbingan bahasa kepada rekan senegarannya dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Pendekatan ini dikenal sebagai peer-mentoring model dan telah terbukti efektif di berbagai negara dalam memfasilitasi proses adaptasi sosial bagi narapidana asing (Croux et al., 2023). Lapas dapat memanfaatkan strategi ini untuk mengoptimalkan kolaborasi internal antar-WBA.

Penyusunan kurikulum pembinaan berbasis kompetensi budaya dapat menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas interaksi di Lapas. Kurikulum ini mencakup pemahaman lintas budaya, pelatihan komunikasi nonverbal, dan kesadaran perbedaan norma sosial. Model ini sejalan dengan konsep *Intercultural Development Continuum* yang menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan untuk mencapai kompetensi antarbudaya tingkat lanjut (Hammer, 2020).

Perluasan kerja sama internasional dengan lembaga asing yang menangani narapidana lintas negara juga menjadi solusi potensial. Melalui pertukaran praktik terbaik (*best practices*), Lapas dapat memperoleh pedoman komunikasi efektif yang sesuai dengan konteks multikultural (Watson, 2017). Kolaborasi ini juga dapat mendukung pengembangan fasilitas penerjemah resmi dan penyediaan sumber daya tambahan untuk mendukung WBA.

Secara keseluruhan, strategi yang diusulkan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi fasilitas komunikasi, dan dukungan kebijakan institusional. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan inovasi,

diharapkan efektivitas komunikasi antarbudaya di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura dapat meningkat, sehingga memperkuat keberhasilan proses pembinaan, mengurangi potensi konflik, dan menjamin perlindungan hak-hak warga binaan asing.

SIMPULAN

Kesimpulan, komunikasi antarbudaya antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan asing (WBA) di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh perbedaan bahasa, nilai sosial, norma budaya, dan latar belakang psikologis. Hambatan komunikasi berdampak signifikan terhadap efektivitas pembinaan, akses layanan, serta kualitas interaksi antarindividu, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa strategi komunikasi berbasis kompetensi antarbudaya, penggunaan panduan multibahasa, pemanfaatan teknologi penerjemahan, serta pelatihan petugas melalui pendekatan empatik dan interdisipliner menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas komunikasi. Selain itu, dukungan kebijakan institusional dan penyediaan fasilitas pendukung, seperti penerjemah resmi dan kurikulum pembinaan berbasis budaya, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang inklusif, harmonis, dan adil. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik komunikasi antarbudaya di lembaga pemasyarakatan, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak warga binaan asing dan meningkatkan keberhasilan proses rehabilitasi secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Bahasa, J., & Prima, I. (2021). BIP: Jurnal Bahasa Indonesia Prima, Vol 3, No. 1, Maret 2021, pp. *Jurnal Bahasa Indonesia*, 3(1), 108-113.
- Barnett, G. A. (2011). Komunikasi dan evolusi SNS: Perspektif konvergensi budaya. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 43-54.
- Bhargo, M. D. (2021). Pola komunikasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem (Studi pada narapidana warga negara asing). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 1-8. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2179>

- Brosens, D., Croux, F., Vandeveld, S., & Claes, B. (2023). Understanding cross-cultural communication barriers in prison contexts: Implications for foreign inmates' rehabilitation. *European Journal of Criminology*, 20(1), 243–267. <https://doi.org/10.1177/14773708211000633>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed-methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Croux, F., Vandeveld, S., Claes, B., Brosens, D., & De Donder, L. (2023). An appreciative inquiry into foreign national prisoners' participation in prison activities: The role of language. *European Journal of Criminology*, 20(1), 251–269. <https://doi.org/10.1177/14773708211000633>
- Deardorff, D. K. (2019). *Manual for developing intercultural competence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108673093>
- Gudykunst, W. B. (2005). *Bridging differences: Effective intergroup communication* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, M., & Hamidah, H. M. R. (2024). Pola komunikasi interpersonal dalam membangun hubungan baik antara sipir dan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i3.2491>
- Hanvey, C. (2022). Multilingual approaches to inclusion in European prisons: Improving communication for foreign inmates. *International Journal of Prisoner Health*, 18(3), 278–293. <https://doi.org/10.1108/IJPH-08-2021-0087>
- Hasnuryadi, M. (2020). Hukum terhadap pelaksanaan hak mendapatkan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2689>
- Hermansyah, A. M., & C. E. T. (2022). Strategi komunikasi dalam upaya pendekatan pegawai pemasyarakatan kepada narapidana untuk mencegah kericuhan di dalam Lapas Kelas IIB Muara Enim. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, 1349–1358. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9002>
- Imron Masyhuri, Dwi S., et al. (2022). Survei nasional penyalahgunaan narkoba 2021. *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.
- John W. Creswell, J. D. C. (2016). *Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Kincaid, D. L., & Barnett, G. A. (1983). Cultural convergence in cross-cultural contexts: An empirical test of mathematical theory. *Communication Monographs*, 18(2), 59–78.
- Kustiawan, W., Hidayati, J., Daffa, V., Hamzah, A., Harmain, M., Fadli, A., & Kuswananda, E. (2022). Keberadaan ilmu komunikasi dan perkembangan teori komunikasi dalam peradaban dunia. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 1(2), 73–76.
- Malinda, D., Hariyanto, F., & Lubis, F. O. (2020). Pola komunikasi lintas budaya pada pasangan WNI dan WNA. *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation*,

- and Media Communication Studies Journal*, 2(2), 88–102.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM>
- Nisa Septiana, Z., & Zulfatul, S. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif.
- Noermanzah. (2019). Bahasa sebagai alat komunikasi, citra pikiran, dan kepribadian. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba)*, 306–319.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba>
- Pakasi, U. (2018). Identifikasi potensi sumber konflik daerah perbatasan Indonesia - Papua New Guinea (Studi kasus di wilayah perbatasan Skow - Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua). *Papua Review*, 2(1), 113–121. <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/jurnalfisip>
- Rahmawati, V. S. (2023). Pola komunikasi interpersonal sipir wanita dan warga binaan (Studi fenomenologi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta).
- Saputra, M. D., Putri, W. S., & Listya, I. (2023). Dinamika komunikasi kelompok dalam teori pertukaran sosial: Pengaruh interaksi interpersonal. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 7, 65–76.
- Siregar, U. A., Silvi, N., & Hasibuan, W. (2023). Dinamika komunikasi kelompok dalam teori pertukaran sosial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(2), 95–104.
- Solihat, M. (2018). Adaptasi komunikasi dan budaya mahasiswa asing program internasional di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. *Jurnal Common*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.34010/common.v2i1.872>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Suryani, W. (2013). Komunikasi antar budaya: Berbagi budaya berbagi makna. *Jurnal Farabi*, 10(1), 1–14.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. (2022). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Utami, L. S. S. (2015). The theories of intercultural adaptation. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 180–197.
- Watson, B. M. (2017). Intercultural and cross-cultural communication. In *Inter/Cultural Communication: Representation and Construction of Culture* (pp. 24–45). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781544304106.n2>
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.